

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memenuhi dana untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan negara mengandalkan dua sumber pokok dari dalam negeri dan luar negeri. Ada beberapa sumber yang didapat dari luar negeri diantaranya adalah pendapatan hibah dan pinjaman dari luar negeri, sedangkan sumber dari dalam negeri yang paling potensial dan paling besar adalah sumber penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan, pajak daerah dan PPNBM (pajak pertambahan nilai atas barang mewah). Jadi dengan adanya pajak, negara dapat melakukan pembangunan untuk memfasilitasi masyarakat.

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan undang undang. Beberapa sistem administrasi perpajakan dengan perpaduan teknologi, berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer's account*, *e-Registration* dan *e-Counselling*. Kelebihan secara umum dari teknologi informasi menciptakan suatu bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat mudah dan akurat serta meningkatkan pedoman terhadap Wajib Pajak dari segi kualitas manajemen waktu dan untuk meminimalisir kontak langsung Direktorat

Jendral Pajak dengan Wajib Pajak sehingga tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Peran sistem administrasi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif. Dalam penelitian Sinta dkk(2010) menyatakan bahwa kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat diwujudkan dengan adanya penerapan sistem administrasi modern yang dapat ditandai dengan adanya: struktur organisasi berdasar fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui adanya *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan dari wajib pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983 menerapkan *Self Assesment System (SAS)* yang sebelumnya memakai *Official Assesment System (OAS)*. Adanya perubahan penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sedangkan penggunaan SAS melibatkan peran keaktifan wajib pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pada KPP yang bersangkutan.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan mengetahui perundang undangan perpajakan dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang di perbaharui setiap waktu. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran untuk membayar pajak, Direktorat

Jenderal Pajak banyak melakukan sosialisasi tentang perpajakan yang bisa kita lihat pada baliho – baliho di jalan raya.

Peran pengetahuan perpajakan dapat mendukung tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai kendala yang dimiliki wajib pajak yang minim tentang pengetahuan perpajakan dan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang tidak diketahui oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku Witono (2008)

Pengusaha kena pajak dapat didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk dengan Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan wajib pajak yang menaati segala peraturan perundangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan informal. Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan pajak dapat dilihat dari segi: Perilaku dan Ekonomi wajib pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempunyai

pengaruh yang positif dalam hal penerimaan pajak terhadap pengusaha kena pajak . Berkaitan dengan hal yang diatas, maka peneliti mengambil judul

“ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi empiris pada wajib pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang difokuskan pada KPP Pratama Surakarta sebagai bahan masukan berbagai hal yang menyangkut kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di KPP Pratama Surakarta.
3. Bagi pihak lain yang membutuhkan informasi yang dapat memberikan pandangan mengenai modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian menyangkut tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Setelah perumusan masalah kemudian pembatasan masalah, lalu menentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat penelitian, dan akhir dari bab I adalah sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian dan topik permasalahan meliputi pemahaman tentang perpajakan, Pengusaha Kena Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Membayar Pajak dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang terkait dan pernah dilakukan sebelumnya, dan diakhiri dengan perumusan hipotesis yang nanti diuji kebenarannya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data yang diperlukan serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini mencakup uraian lebih lanjut mengenai gambaran secara singkat mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Jawa Tengah, gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dijelaskan lebih rinci yang nantinya untuk disimpulkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala – kendala dalam penelitian serta saran – saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.